

BAB II

PERKEMBANGAN PERS DI HINDIA BELANDA

2.1 Perkembangan Pers di Hindia Belanda Awal abad XX

Perkembangan pers di Hindia Belanda tidak lepas dari dinamika sosial dan politik yang berkembang seiring dengan diterapkannya politik etis. Politik etis berdampak pada munculnya golongan terpelajar Bumiputera yang kemudian menjadi tokoh dibalik munculnya pers. Pers digunakan sebagai instrumen komunikasi massa dari penyedia informasi menjadi alat perjuangan politik kaum Bumiputera. Pers dalam masa kolonial Hindia Belanda dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pers Belanda, fase pers Indo-Belanda dan Tionghoa peranakan serta fase pers Bumiputera.

2.1.1 Pers Belanda

Perkembangan surat kabar di Hindia Belanda tidak lepas dari datangnya bangsa Eropa ke tanah air dengan membawa mesin cetak. Sebuah surat kabar, yang dinamai *Memories der Nouvelles*, telah diedarkan atas perintah Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1615. Buletin ini sebenarnya merupakan kumpulan berita dan kutipan surat yang ditulis tangan pada lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran tersebut disebarkan kepada para pegawai VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di berbagai pelosok kepulauan, yang sangat kekurangan informasi. Selain itu, dilaporkan pula bahwa pada tahun 1644 pemerintah Ambon secara rutin menerima berita dari Batavia dengan cara yang serupa.³⁸

Pramoedya Ananta Toer membagi Sejarah pers masa kolonial Hindia Belanda ini menjadi dua babak. Babak pertama dimulai sejak surat kabar pertama di Hindia Belanda pada tahun 1744 sampai dengan tahun 1854. Pada periode ini, surat kabar di Hindia Belanda didominasi oleh pers berbahasa Belanda yang melayani kepentingan administratif dan ekonomi kolonial Eropa. Toer menyebutkan periode ini sebagai “babak putih” dalam *Sejarah Indonesia Modern*.

³⁸ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 3.

Ia menyebut periode tersebut demikian karena pada masa itu surat kabar sepenuhnya dimiliki oleh kalangan Eropa, menggunakan bahasa Belanda, berfokus pada kehidupan orang-orang Eropa, serta tidak berkaitan dengan kepentingan sosial dan kehidupan masyarakat setempat atau penduduk Bumiputera.³⁹

Surat kabar pertama yang tercatat muncul pertama kali di Hindia Belanda, yakni *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnements* pada 7 Agustus 1744. Setahun kemudian berganti nama menjadi *Bataviase Nouvelles*. Surat kabar tersebut terbit di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff dan dicetak oleh Jan Erdman Jordens di percetakan Kastil Batavia. Terbit mingguan dengan format sederhana, surat kabar ini memuat pengumuman resmi pemerintah serta iklan, terutama terkait lelang. Namun, keberadaan iklan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pimpinan VOC di Belanda karena dianggap berpotensi membocorkan informasi perdagangan. Akibatnya, pada tahun 1746 penerbitannya dihentikan meskipun Jordens masih memiliki izin resmi. Surat kabar ini secara resmi dihentikan setelah turun surat dari Heeren XVII⁴⁰ di negeri Belanda pada tanggal 20 November 1744 yang isinya antara lain berbunyi:

“Dewijl men... van het drukken en uitgeven van de couranten te Batavia , hetgeen nu sedert kort s gepractisscerd, al nadelige gevolgen her te lande heft bespeurd, zoo zal Ued, aanstonds na do onvangst dezest het drukken en uitgeven van die courant verbieden”

(Bahwasanya percetakan dan penerbitan surat kabar di Batavia seperti yang sudah terjadi selang beberapa waktu yang lalu, ternyata telah memberi gejala adanya hal-hal yang merugikan. Karena itu sukalah Paduka Tuan seterimanya surat ini melarang percetakan dan penerbitan surat kabar tersebut)⁴¹

Berdasarkan surat tersebut, dapat disimpulkan penyebab dihentikannya surat kabar tersebut dikarenakan kekhawatiran pemerintah Belanda akan berita-

³⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Sejarah Modern Indonesia: Babak Perintis* (Jakarta: Universitas Res Republica, 1964), hlm. 43.

⁴⁰ Heeren XVII (dibaca: Heeren Zeventien) atau Dewan XVII adalah badan yang pembuat keputusan strategis untuk VOC seperti keputusan mengenai deviden, armada, barang-barang yang akan di bawa ke Hindia Timur, menetapkan waktu lelang. Dewan ini diisi oleh 17 Petinggi bergiliran dari Amsterdam dan Middleburg.

⁴¹ Soebagijo, I.N, *Sejarah pers di Indonesia* (Dewan Pers, 1977), hlm. 8,

berita seputar perdagangan di Hindia Belanda akan dimanfaatkan oleh rival mereka di Eropa. Dengan demikian, *Bataviasche Nouvelles* menjadi surat kabar pertama yang di *breidel*.⁴² Selanjutnya, di kota yang sama muncul surat kabar *Het Vendu Nieuws* (1776) sebagai surat kabar terakhir masa VOC.⁴³ Surat kabar ini didirikan oleh L. Dominicus setelah mendapatkan lisensi untuk menerbitkan iklan mingguan dari pemerintah. Iklan pada surat kabar ini didominasi oleh iklan lelang sehingga diberi nama *Het Vendu Nieuws*. Selanjutnya, surat kabar ini dibeli oleh pemerintah dan bertahan sampai bubarnya VOC. Edisi terakhir surat kabar ini terbit pada tahun 1809.⁴⁴

Gubernur Jendral Daendels menerbitkan surat kabar *Bataviasche Koloniale Courant* (1810). Surat kabar ini memuat peraturan-peraturan mengenai penempatan jumlah tenaga kerja untuk tata buku, juru cetak, kepala pesuruh dan lain-lain. Sementara Daendels kembali ke Belanda setelah Inggris menguasai Hindia Timur, *Bataviasche Koloniale Courant* berhenti terbit. Pada masa gubernur Raffles, surat kabar *Java Gouvernment Gazette* terbit pada 29 Februari 1812 hingga 13 Agustus 1814. Sebuah terbitan mingguan yang dicetak terutama dalam bahasa Inggris di percetakan milik Perusahaan oleh A. H. Hubbard. Isi terbitan tersebut mencerminkan sikap permusuhan antara pihak Belanda dan Inggris. Namun demikian, terbitan ini juga memuat berita-berita dari Eropa serta artikel-artikel yang berkaitan dengan kehidupan dan adat istiadat penduduk Bumiputera. Kelak dari materi surat kabar ini lahir karya utama Raffles berjudul *History of Jawa* (1817). Setelah masa kolonial Inggris, muncul surat kabar *Bataviasche Courant* pada tanggal 20 Agustus 1816. Kedudukannya digantikan 12 tahun kemudian oleh *Javasche Courant*. *Javasche Courant* terbit seminggu 3 kali yang memuat berita-

⁴² Breidel atau pembredelan adalah wewenang pemerintah colonial Belanda untuk mencabut izin terbit atau menghentikan aktivitas percetakan sebuah surat kabar secara paksa. Hal ini biasanya didasarkan pada *Persordonnantie* 1931 yang memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal untuk membungkam pers yang dianggap menyebarkan kebencian (*haatzaaiende artikelen*) atau mengganggu ketertiban umum (*rust en orde*).

⁴³ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4

berita resmi, juga berita-berita mengenai pelelangan dan berita-berita kutipan dari harian-harian di Eropa.⁴⁵

Pada seperempat kedua abad ke-19, perkembangan surat kabar di Hindia Belanda memasuki fase baru. Masa ini ditandai dengan tumbuhnya “pers putih” swasta serta mulai terbitnya surat kabar yang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Pada tahun 1825, *Bataviaasch Advertentieblad* diterbitkan di Batavia melalui percetakan pemerintah (*Landsdrukkerij*).⁴⁶ Surat kabar ini kemudian dilebur ke dalam *Javasche Courant* (1829). Selanjutnya, pada tahun 1829, terbit pula sebuah surat kabar yang berorientasi pada kegiatan perdagangan, yaitu *Nederlandsch Indisch Handelsblad*, yang juga diterbitkan di Batavia. Meskipun demikian, identitas penerbit dan pencetak surat kabar ini tidak diketahui secara pasti, namun dapat dipastikan bahwa pencetakannya tidak dilakukan di percetakan pemerintah.

Di Surabaya, surat kabar pertama mulai terbit pada bulan Maret 1836 yaitu *Soerabajaasch Advertentieblad*. Setahun kemudian, hadir surat kabar mingguan *Soerabaijasch Courant*. Surat kabar ini diduga diterbitkan oleh F. C. Smith, yang sekitar tahun 1834 telah membeli mesin cetak dari H. J. Domis. Kemudian pada tahun 1838 terbit juga surat kabar berkala, *Verhandalingen van het Bataviaasche Genootschap* dan *Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie*. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1845, di Semarang terbit sebuah surat kabar iklan mingguan bernama *Semarangsche Advertentieblad*, yang pada tahun 1852 mengalami perubahan nama menjadi *De Locomotief*. Surat kabar tersebut dicetak di percetakan Oliphant & Co. Setahun setelahnya, Semarang kembali menyaksikan kemunculan surat kabar lain, yakni *Semarangsche Courant*.⁴⁷ Selang satu tahun kemudian, di Surabaya lahir *Soerabajaasch Handelsblad*. Pada tahun 1853 *Soerabajaasch Advertentieblad* kemudian mengalami perubahan nama menjadi *Soerabajaasch Nieuws & Advertentieblad*. Surat kabar ini diperkenankan memuat berita, namun

⁴⁵ A. Surjomihardjo, A. B. Lopian, dan Penerbit Buku Kompas, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 25.

⁴⁶ *Landsdrukkerij* merupakan perusahaan percetakan milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Deandels di Batavia (Sekarang Jakarta) yang bertugas menerbitkan dokumen resmi, peraturan, jurnal ilmiah dan buku-buku pemerintah.

⁴⁷ Adam. *Op. Cit.*, hlm. 7.

seluruh isinya berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, surat kabar-surat kabar tersebut pada dasarnya tidak ditujukan sebagai bacaan bagi penduduk Bumiputera, baik dari segi bahasa, isi, maupun orientasi pembacanya. Pada periode yang hampir bersamaan, di Batavia terbit surat kabar *Java Bode* (1852) sebagai pengganti *Het Bataviaasch Advertentieblad* (1851). Surat kabar ini didirikan oleh W. Bruining dengan dukungan H. M. van Dorp, van Hazen Noman, dan Kolff. Pada awal penerbitannya, *Java Bode* terbit dua kali seminggu dengan tarif langganan sebesar 25 gulden per tahun. Selain itu, muncul pula *Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch-Indië* sebagai pesaing utama *Java Bode*, disusul dengan terbitnya *Bataviaasch Handelsblad*.⁴⁸

2.1.2 Fase Pers Indo-Belanda dan Tionghoa Peranakan

Pada babak kedua, perubahan mulai terlihat pada tahun 1854 ketika pemerintah kolonial melonggarkan kebijakan terkait penerbitan surat kabar di Hindia Belanda. Pada babak kedua ini, Pengusahaan pers tidak lagi sepenuhnya berada di tangan orang Eropa, melainkan mulai melibatkan kelompok Indo-Eropa dan Tionghoa. Kehadiran kelompok ini ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun demikian, surat kabar berbahasa Melayu tersebut belum ditujukan kepada masyarakat Bumiputera, melainkan tetap menyasar kalangan Indo-Eropa dan Indo-Tionghoa.⁴⁹ Menurut Ahmat Adam, penggunaan bahasa Melayu dalam pers kolonial tidak serta-merta menjadikan sebuah surat kabar sebagai pers nasional atau pers Bumiputera. Yang menentukan adalah kepemilikan, orientasi ideologis, dan keberpihakan sosial-politik. Ahmat Adam menambahkan bahwa penggunaan bahasa Melayu pada surat kabar non Bumiputera karena fungsinya sebagai *lingua franca*⁵⁰ yang mampu menjangkau pembaca yang lebih luas dibandingkan bahasa Belanda.⁵¹ Dalam konteks ini,

⁴⁸ Surjomiharjo. *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁹ Taufik Rahzen dan Muhidin M. Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: IBOEKOE, 2007), hlm. xi.

⁵⁰ *Lingua franca* adalah bahasa pengantar atau bahasa perantara yang digunakan untuk berkomunikasi antar kelompok yang memiliki bahasa ibu (bahasa pertama) berbeda. Dalam konteks ini adalah bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Hindia Belanda.

⁵¹ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 180.

terbitlah *Bromartani* pada tahun 1855, sebuah surat kabar mingguan yang diterbitkan di Surakarta setiap hari Kamis. Nama *Bromartani* mencerminkan nuansa Melayu sekaligus Jawa. Sebagian besar tenaga redaksi dan pemikirnya berasal dari kalangan Bumiputera, meskipun pendanaan tetap bersumber dari modal asing, yakni kongsi Belanda Hartevelde & Co.⁵² Surat kabar ini menggunakan bahasa Jawa dan Melayu serta melibatkan tenaga teknis dari kalangan Bumiputera. Adam menyebut surat kabar ini sebagai surat kabar berbahasa Bumiputera pertama (*the first vernacular newspaper*).⁵³

Surat kabar berbahasa Melayu lainnya adalah *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* yang terbit tahun 1856. Surat kabar ini diterbitkan oleh pengusaha Eropa dan secara eksplisit diarahkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas pedagang, terutama Tionghoa, Arab, dan Bumiputera perkotaan. Selain itu, *Soerat Chabar Betawi* (1858), *Slomporet Melajoe* (1860) dan *Bintang Timoer* (1862) menggunakan bahasa Melayu rendah, bahkan dalam beberapa kasus disajikan berdampingan dengan bahasa daerah seperti Jawa, guna memperluas jangkauan pembaca.⁵⁴

Pada tahun 1871, di Surakarta terbit surat kabar *Vorstenlanden*. Selanjutnya, pada tahun 1883, di Cirebon mulai terbit surat kabar *Tjiremai*. Di Batavia, perkembangan pers ditandai dengan terbitnya *Pembrita Betawi* yang terbit dalam rentang waktu 1886–1916, serta *Chabar Hindia Olanda* yang beredar antara tahun 1888 hingga 1897. Surat Kabar *Pembrita Betawi* (1886) menjadi salah satu surat kabar berbahasa melayu yang sepenuhnya dikuasai Indo-Eropa yang di jajaran redaksinya terdapat Bumiputera. Surat kabar ini memiliki tiga redaktur utama dari golongan Peranakan yaitu Lie Kim Hok, dari golongan Indo yaitu Ferdinand Wiggers dan golongan priyayi (Bumiputera) yaitu Tirto Adhi Soerjo. Sementara itu, di Medan muncul surat kabar *De Sumatra Post* yang terbit cukup lama, yakni sejak 1899 hingga 1942. Di Bandung, pada tahun 1895, terbit surat kabar *De Preanger Bode* di bawah pimpinan redaksi R. J. de Vries. Perkembangan surat

⁵² A. Surjomihardjo, A. B. Lopian, dan Penerbit Buku Kompas, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 27.

⁵³ Adam, *Op. Cit.* hlm. 17

⁵⁴ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 20 Desember 2018, hlm. 36-37.

kabar ini semakin pesat seiring terjalannya kerja sama dengan firma Kolff & Co. Memasuki awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902, di Batavia terbit *Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*. Surat kabar ini dicetak di percetakan yang sama dengan *Pembrita Betawi* dan mampu bertahan hingga masa peralihan akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20.⁵⁵ Dalam kurun waktu 1880-1900 semakin banyak tenaga-tenaga pers dari kalangan Indo-Tionghoa dan Bumiputera. Meskipun semakin banyak tenaga Indo-Tionghoa dan Bumiputera yang terlibat dalam dunia pers, tidak satu pun dari surat kabar yang mereka terbitkan berani secara terbuka berhadapan dengan pemerintahan kolonial. Sebagian besar surat kabar tersebut justru bergerak di bidang perniagaan serta memuat berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Bumiputera.⁵⁶

Komunitas Tionghoa di Hindia Belanda juga mengembangkan tradisi penerbitan surat kabar yang dikenal sebagai pers Melayu-Tionghoa. Pers ini menggunakan bahasa Melayu-Tionghoa, dikelola dan dimiliki oleh kalangan peranakan Tionghoa, serta ditujukan terutama bagi pembaca dari kelompok yang sama. Kemunculan surat kabar Melayu-Tionghoa tidak terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi. Secara sosial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan ras, asal-usul, dan status hukum kolonial. Pada awalnya, kedudukan ras Tionghoa disamakan dengan penduduk Bumiputera, sementara kelompok Eropa menempati posisi sosial yang lebih tinggi. Konsekuensinya, hak dan kewajiban masing-masing golongan diatur secara berbeda melalui peraturan perundang-undangan kolonial.

Kebangkitan Tiong Hoa Hwee Koan⁵⁷ bukan hanya menandai munculnya nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda. Lebih penting dalam konteks perkembangan pers *Vernacular*, kebangkitan ini mendorong tumbuhnya secara tiba-tiba berbagai “organ” atau corong organisasi tersebut yang sangat berorientasi

⁵⁵ A. Surjomihardjo, A. B. Lopian, dan Penerbit Buku Kompas, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 27

⁵⁶ Pramoedya Ananta Toer, *Sejarah Modern Indonesia: Babak Perintis* (Jakarta: Universitas Res Republica, 1964), hlm. 55.

⁵⁷ Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) merupakan organisasi bentukan peranakan di Batavia yang bertujuan untuk mempromosikan Kembali adat istiadat orang-orang Tionghoa sesuai dengan kepercayaan Khonghucu serta memperluas pengenalan aksara dan Bahasa Tionghoa.

dan bercorak Tionghoa. untuk pertama kalinya di Hindia Belanda, pada tahun 1901 muncul surat kabar yang menggunakan bahasa Melayu Rendah tetapi memiliki judul berbahasa Tionghoa, dan pada halaman-halamannya disisipkan huruf-huruf Tionghoa di antara baris-baris teks. Pada April 1901, sekitar setahun setelah berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan, Tan Ging Tiong dan IJoe Tjai Siang yang seorang mualaf Kristen yang kemudian menjadi Konfusianis dan oleh seorang misionaris Belanda dituduh sebagai “tidak waras secara mental dan pecandu opium” mendirikan *Li Po*, yang juga mereka edit sendiri. Surat kabar ini dicetak di percetakan milik orang Tionghoa, Soekaboemische Drukkerij, dan berjanji akan secara rutin memuat artikel-artikel tentang ajaran Konfusianisme. Tidak lama kemudian, pada tahun 1902, percetakan Sie Dhian Ho yang baru berdiri di Surakarta mulai menerbitkan mingguan Tionghoa lainnya, *Sien Po*, yang diedit oleh Tan Soe Djwan. Meskipun menggunakan bahasa Melayu Rendah, surat kabar ini juga memakai huruf-huruf Tionghoa untuk menuliskan nama dan istilah tertentu dalam bahasa Tionghoa. Pada tahun yang sama, Sie Dhian Ho juga memproduksi *Taman Pewarta*. Walaupun judulnya menggunakan bahasa Melayu, Sie Dhian Ho menyebut surat kabar yang terbit tiga kali seminggu tersebut sebagai “organ tidak resmi dari Tiong Hoa Hwee Koan”. Sementara itu, masih pada tahun 1902, Lo Swie Tek di Surabaya menerbitkan *Loen Boen*, yang juga merupakan organ dari Tiong Hoa Hwee Koan.⁵⁸

Sekitar waktu yang sama, sebuah percetakan Tionghoa baru di Semarang mulai menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu bernama *Warna Warta*, yang diedit oleh F. D. J. Pangemanan. Direktur dan manajernya tercatat sebagai Kwa Wan Hong, sedangkan penerbit dan pemiliknya adalah N.V. Drukkerij en Handel in Schrijfbehoeften “Hap Sing” Kongsie. Meskipun dimaksudkan sebagai surat kabar komersial untuk semua golongan di Hindia, dengan delapan halaman, surat kabar ini juga disebut sebagai “organ” tidak resmi Tiong Hoa Hwee Koan. Tahun 1903 menandai munculnya lebih banyak lagi surat kabar yang dikelola atau dimiliki oleh orang Tionghoa peranakan. Pada 15 Maret, percetakan Kwa Hok Ing

⁵⁸ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 75.

meluncurkan edisi contoh *Pewarta Soerabaja*, sebuah harian yang dimaksudkan untuk menyaingi *Bintang Soerabaia*. Editornya adalah H. F. R. Kommer. Dari percetakan Tjoe Toeijang yang sebelumnya hanya menerbitkan buku-buku cerita terbit di Batavia surat kabar *Kabar Perniagaan*, diedit oleh F. Wiggers dengan Lie Kim Hok dan Tan Kim Bo sebagai asisten editor. Karena Lie dan Tan merupakan anggota komite Tionghoa Hwee Koan, jelas bahwa surat kabar ini juga merupakan salah satu organ tidak resmi organisasi tersebut.⁵⁹

Pada 1 Oktober 1910, kaum muda peranakan Tionghoa di Batavia menerbitkan surat kabar mingguan *Sin Po* di bawah pimpinan Lauw Giok Lan dan Yoe Sin Gie. Surat kabar ini memuat tulisan mengenai situasi internasional serta kisah-kisah klasik Tiongkok, seperti *Hikayat Tiga Kerajaan*. Karena memperoleh perhatian luas dari pembaca, *Sin Po* pada tahun 1911 berkembang menjadi surat kabar harian. Selanjutnya, pada tahun 1923, Hauw Tek Kong yang sebelumnya menjabat sebagai direktur *Sin Po* mendirikan surat kabar *Keng Po* di Batavia. Pada akhir 1929, terbit *Sin Tit Po* di bawah pimpinan Liem Koen Hian. Surat kabar ini pada awalnya bernama *Sin Jit Po*, yang merupakan pengganti edisi Jawa Timur *Sin Po* yang mengalami kegagalan, kemudian dikelola oleh Lim Bok Sioe dan berganti nama hingga dikenal luas sebagai *Sin Tit Po*.

Dalam tahap awal perkembangannya, struktur perusahaan, redaksi, dan staf surat kabar Tionghoa banyak melibatkan tenaga Indo-Eropa, sebagaimana terlihat pada penerbitan awal *Chabar Perniagaan* dan *Sin Po*. Namun, seiring pertumbuhan pers Melayu-Tionghoa, surat kabar-surat kabar tersebut semakin mampu berdiri secara mandiri. Selain itu, mereka juga membuka peluang bagi kalangan Bumiputera untuk terlibat sebagai jurnalis maupun pengelola, seperti yang terjadi pada *Keng Po*, *Siang Po*, *Sin Po*, *Pewarta Soerabaia*, *Mata Hari*, dan *Sin Jit Po*.

Pada dekade 1930-an, sejumlah surat kabar Tionghoa seperti *Nam Sing*, *Kiao Seng*, *Kong Hoa Po*, *Mata Hari*, *Kung Yen*, *Soera Semarang*, *Djit Po*, dan *Hong Po* menunjukkan kecenderungan yang semakin politis. Sementara itu, surat kabar seperti *Sin Po*, *Siang Po*, dan *Sin Tit Po* merepresentasikan beragam aliran

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

politik yang berkembang dalam masyarakat peranakan Tionghoa. Secara umum, periode 1930-an ditandai dengan meningkatnya jumlah surat kabar di Hindia Belanda. Namun, pada masa yang sama, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan pengawasan dan sensor yang ketat terhadap pers, terutama terhadap surat kabar yang dinilai berpotensi mengancam kepentingan kolonial.⁶⁰

2.1.3 Fase Pers Bumiputera

Memasuki abad ke 20, perubahan signifikan terjadi ketika muncul surat kabar yang tidak hanya berbahasa melayu, tetapi juga dimiliki dan dikelola oleh kaum Bumiputera. Fase ini menandai lahirnya pers Bumiputera yang secara sadar memosisikan diri sebagai instrumen aspirasi politik mereka. Surat kabar tersebut yaitu *Soenda Berita* (1903) dan *Medan Prijaji* (1907).⁶¹ Kedua surat kabar tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran R.M. Tirta Adhi Soerjo, yang sebelumnya menjabat sebagai redaktur *Pemberita Betawi*. Setelah mengundurkan diri dari surat kabar tersebut pada akhir tahun 1902, Tirta mendirikan *Soenda Berita* pada tahun 1903. Surat kabar ini terbit sebagai mingguan dan dicetak oleh G. Kolff & Co. di Batavia. Jumlah halamannya mencapai dua puluh empat halaman, dengan empat belas halaman di antaranya diisi oleh iklan. Artikel-artikel yang dimuat, yang mencakup bidang perdagangan, pertanian, dan hukum, menunjukkan keinginan redaktur untuk mendorong pembacanya agar mencapai kemajuan melalui pengetahuan dan pendidikan. Namun, surat kabar ini hanya bertahan sekitar dua tahun. Hal tersebut disebabkan oleh keharusan Raden Mas Tirta Adhi Soerjo meninggalkan Batavia menuju Kepulauan Maluku pada akhir tahun 1904. Pada awal tahun yang sama, ia terlibat dalam sebuah perkara hukum yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas persnya, yaitu tuduhan pelanggaran kepercayaan. Akibat perkara tersebut, Tirta harus menjalani masa pembuangan di Maluku selama kurang lebih satu setengah tahun. Dalam fase kepemimpinannya, *Soenda Berita* belum memperlihatkan karakter pers yang secara terbuka bersikap kritis terhadap

⁶⁰ S. I. Notodidjojo, *Jagat Wartawan Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 64.

⁶¹ Miftahul Habib Fachrurazi, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 13, no. 1 (Desember 2017): hlm. 25.

kolonialisme. Tonggak penting dalam perkembangan pers Bumiputera justru ditandai oleh terbitnya *Medan Prijaji* pada tanggal 1 Januari 1907, yang didirikan Tirta Adhi Soerjo setelah ia meninggalkan *Soenda Berita*.⁶²

Medan Prijaji menjadi surat kabar mingguan Bumiputera pertama yang sepenuhnya matang di Jawa. Surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi sarana efektif mobilisasi sosial dan politik melalui narasi kritis yang menentang kebijakan kolonial yang bersifat eksploitatif. Melalui pemberitaannya, *Medan Prijaji* berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Bumiputera, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terbentuknya embrio organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Strategi yang digunakan *Medan Prijaji* mencakup pemanfaatan retorika tajam, simbolisme yang kuat, serta artikulasi aspirasi kolektif Bumiputera dalam artikel-artikel yang diterbitkan. Selain itu, kegiatan seni dan kebudayaan yang diinisiasi oleh surat kabar ini berfungsi sebagai medium alternatif untuk mengekspresikan kritik dan ketidakpuasan terhadap sistem kolonial. Meskipun menghadapi sensor ketat dan tekanan represif dari pemerintah kolonial, *Medan Prijaji* tetap konsisten menyuarakan perjuangan rakyat hingga akhirnya dihentikan pada tahun 1914.⁶³

Sebelum terbitnya *Medan Prijaji*, telah muncul surat kabar *Bintang Hindia* pada tahun 1903 yang dipimpin oleh Abdul Rivai. Walaupun berbahasa Melayu, Surat kabar ini tidak dapat dikategorikan sebagai surat kabar Bumiputera karena secara kepemilikan bukan milik Bumiputera, melainkan perusahaan N.J. Boon di Amsterdam, Belanda. Namun demikian, *Bintang Hindia* berperan penting dalam membangkitkan kesadaran Nasional dan intelektual kaum Bumiputera. Melalui tulisan-tulisannya, Abdul Rivai berupaya membentuk identitas kolektif baru bagi

⁶² Taufik Rahzen dan Muhidin M. Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: IBOEKOE, 2007), hlm. xxi.

⁶³ Hasan Mukhlis dan Arif Saefudin, "Resistance Through the Pen: A Critical Analysis of the Role of Prijaji Field in the National Movement (1907-1914)," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 6, no. 2 (November 2024): hlm. 246,

Bumiputera terdidik yang belum sepenuhnya terlepas dari bayang-bayang priyayi⁶⁴ lama. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengenalan istilah bangsa Hindia untuk membedakan penduduk Bumiputera dari orang Eropa, sekaligus menumbuhkan kesadaran persatuan lintas etnis dan geografis. Rivai juga mengklasifikasikan masyarakat Bumiputera ke dalam kelompok rakyat kebanyakan, *Bangsawan Oesoel* dan *Bangsawan Fikiran*⁶⁵. dengan penekanan pada peran kaum terdidik sebagai motor kemajuan. Konsep *Kaoem Moeda* yang dikemukakan Abdul Rivai merepresentasikan kelompok Bumiputera terdidik yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, kemajuan, dan tanggung jawab sosial.⁶⁶ Dalam konteks ini, *Medan Prijaji* dapat dipandang sebagai penerus *Bintang Hindia* sebagai suara nasionalistis masyarakat Bumiputera.

Tidak lama setelah peluncuran *Medan Prijaji*, Tirta Adhi Soerjo menerbitkan *Soeloeh Keadilan* (Obor Keadilan) yang mulai terbit pada April 1907. Judul majalah bulanan ini diusulkan oleh R. M. T. Pandji Arjodinoto yang, bersama Tirta Adhi Soerjo sebagai pemimpin redaksi, duduk dalam dewan redaksi hingga ia diangkat menjadi Bupati Pemalang, Pekalongan. Tirta juga ingin menerbitkan sebuah majalah perempuan, karena ia meyakini bahwa kebangkitan elite Bumiputera tidak seharusnya terbatas hanya pada kaum laki-laki yang melek huruf. Perempuan Indonesia, meskipun jumlah mereka yang dapat membaca masih sedikit, juga perlu dijangkau. Oleh karena itu, pada Juni 1908 Tirta mendirikan *Poetri Hindia* (Putri Hindia). Seperti halnya penerbitan-penerbitannya yang lain, Tirta meminta dukungan moral dari kalangan atas kelas Priayi. Pada saat peluncuran *Poetri Hindia*, ia meminta Bupati Karanganyar, Raden Temenggong Tirta Koesoemo, untuk menjadi pelindungnya, sementara Tirta sendiri menjabat

⁶⁴ Golongan Priyayi merupakan golongan kelas tingkat tinggi atau elit di kalangan masyarakat tradisional Jawa. Golongan ini diisi oleh orang-orang terhormat karena secara historis merupakan keturunan bangsawan kerajaan.

⁶⁵ Bangsawan Oesoel merujuk pada kaum atau golongan elite tradisional atau feodal yang mendapatkan status sosial, penghormatan dan jabatan berdasarkan garis keturunan atau asal-usul keluarga. Sedangkan, Bangsawan Fikiran merujuk pada kaum atau golongan yang mendapatkan status sosial melalui pendidikan modern dan kecakapan intelektual.

⁶⁶ Miftahul Habib Fachrurrozi, Warto, dan Mulyoto, "The Abdul Rivai's Thought of Nationalism in the Bintang Hindia Newspaper," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 4, no. 6 (Desember 2017): 76–78

sebagai penasihat redaksi bersama seorang bernama R. S. T. Amidjojo. Beberapa perempuan Belanda atau Indo-Eropa serta istri-istri dari sejumlah priayi terkemuka juga duduk dalam dewan redaksi sebagai pemimpin redaksi atau redaktur.⁶⁷

Perkembangan pers berhaluan nasional di Hindia Belanda semakin pesat pada awal abad ke-20. Pada 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar pertama yang disebut sebagai “surat kabar untuk perempuan Alam Minangkabau” dari percetakan Snelpersdrukkerij Orang Alam Minangkabau. Surat kabar ini bernama *Soenting Melajoe* (perhiasan Melayu) dan terbit setiap delapan hari sekali. Surat kabar ini dipimpin oleh Datoek Soetan Maharadja dengan tujuan sebagai media perempuan yang bersifat reformis dan mendorong kaum intelektual Minangkabau. Surat ini dikelola dengan dibantu oleh putrinya sendiri, Zoebaidah Ratna Djoewita dan Siti Rohana dari kota Gedang, Fort De Kock (sekarang Bukittinggi). Kelak, Siti Rohana berperan penting dalam menyebarkan pendidikan sehingga dikenal sebagai pelopor Pendidikan perempuan di Sumatra. Pada Januari 1910, di Medan terbit surat kabar *Pewartu Deli* yang didirikan oleh Dja Endar Moeda setiap hari rabu dan sabtu.⁶⁸ Selanjutnya, pada tahun 1916 terbit surat kabar pertama yang menggunakan istilah “Merdeka” yaitu surat kabar *Benih Merdeka* di Medan. Mohammad Samin menjadi pemimpin dari Komisaris Sarekat Islam. Penggunaan istilah “Merdeka” membuat pemerintah kolonial gusar. Namun, urusan nama pada surat kabar tersebut tidak sampai ke pengadilan.⁶⁹ Pada 1 Maret 1912, terbitlah surat kabar *De Expres* di Bandung. Didirikan oleh Douwes Dekker dan dibantu oleh dua rekannya yang kemudian disebut sebagai “tiga serangkai” yaitu Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Selanjutnya di Surabaya terbit surat kabar *Oetoesan Hindia* yang terbit pertama kali Desember 1912. Didirikan oleh tokoh-tokoh SI seperti Oemar Said Tjokroaminoto.⁷⁰ Kemudian di Semarang, terbit surat kabar SI lainnya yaitu *Sinar Djawa* pada tahun 1914. Didirikan oleh Mohammad Joesoef yang

⁶⁷ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 111.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 142-150

⁶⁹ Taufik Rahzen dan Muhidin M. Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: IBOEKOE, 2007), hlm. 124

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 81-83

kemudian berpindah tangan ke Semaoen. Pemuda berusia 18 tahun ini menggerakkan *Sinar Djawa* ke kutub Progresif dan radikal.⁷¹

Menjelang masa kemerdekaan, pertumbuhan media di berbagai daerah terus meningkat. Secara umum, pers Bumiputera memiliki perbedaan mendasar dengan pers milik Belanda dan Tionghoa. Dari segi material, pers kolonial dan pers Tionghoa umumnya lebih unggul dibandingkan pers Bumiputera. Namun, dari segi idealisme, perbedaan tersebut justru semakin menonjol. Jurnalis pergerakan Indonesia sejak awal memenuhi dua prinsip utama, yaitu memperjuangkan semangat kebangsaan dengan tujuan menegakkan kemerdekaan demi tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera, serta mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan pers sebagai sarana utama dalam perjuangan nasional tersebut.

2.2 Perkembangan Pers Sunda Awal Abad XX

Perkembangan pers Sunda pada awal abad ke-20 berlangsung seiring dengan tumbuhnya pers *Vernacular* di Hindia Belanda. Pada era ini, pers Sunda muncul sebagai fenomena penting dalam sejarah pers di Indonesia, khususnya wilayah Priangan. Sejak diberlakukannya politik etis pada 1901, akses pendidikan bagi kaum Bumiputera meningkat secara signifikan. Hal tersebut yang kemudian memicu lahirnya golongan Bumiputera yang terpelajar.⁷² Meningkatnya golongan terpelajar, menumbuhkan kebutuhan masyarakat akan media bacaan yang menggunakan bahasa daerah selain Belanda dan Melayu. Bahasa Sunda berkembang menjadi medium utama dalam berbagai media cetak lokal, seperti surat kabar, majalah, dan buku, yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga berperan sebagai ruang artikulasi gagasan modernitas, pendidikan, serta pembentukan identitas kebangsaan yang kokoh.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 138

⁷² Nastiti Muhasabah, Subaryana, dan YB Jurahman, "Politik Etis Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Hindia Belanda," *RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 2, no. 1 (2021): hlm. 17.

⁷³ Soni Sadono, Brilindra Pandanwangi, dan Hening Laksani, "Pengajaran Bahasa Sunda Di Priangan Awal Abad Ke-20," *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia* 6, no. 1 (Juni 2023): hlm. 12-16.

Sri Pasoendan, sebuah surat kabar berbahasa Sunda, pertama kali terbit pada Mei 1909. Surat kabar ini terbit setiap hari Senin dan Kamis. Pencetakannya dilakukan di Percetakan Adrian Binkhorst, Bogor. Tirto terlibat dengan *Sri Pasoendan*, namun berlangsung singkat, karena tidak lama kemudian ia digantikan oleh Hiratmaka sebagai redaktur. Jumlah pembaca surat kabar ini sekitar 900 orang.⁷⁴ Pada tanggal 5 Desember 1911 terbit surat kabar *Sinar Pasoendan*.

“Nog een maleisch blad op Bandoeng: de „Sinar Pasoendan”, eigendom van den voormaligen drukker Hadji Mohamad Affandi, wordt te Bandoeng uitgegeven. Het blad, driemaal “s weeks verschijnende, bestaat uit een maleisch- en een soendasch gedeelte. Ook wordt er een rubriek gereserveerd voor de dames. De redactie gaat dus wel met haar tijd mee”

(Satu lagi surat kabar berbahasa Melayu di Bandung, yaitu *Sinar Pasoendan*, yang dimiliki oleh mantan pencetak Hadji Mohamad Affandi, diterbitkan di Bandung. Surat kabar ini terbit tiga kali dalam seminggu dan terdiri atas bagian berbahasa Melayu serta bagian berbahasa Sunda. Selain itu, juga disediakan sebuah rubrik khusus bagi kaum perempuan. Dengan demikian, redaksi surat kabar ini dapat dikatakan mengikuti perkembangan zaman”.⁷⁵

Berselang satu tahun kemudian berganti nama menjadi *Kaoem Moeda* pada tanggal 2 April 1912 yang disunting oleh Amir Hassan Wignjadisastra dan R. S. Wigno Darmodjo, serta terbit tiga kali dalam seminggu.⁷⁶ Surat kabar *Sinar Pasoendan* yang telah diaktifkan kembali Parada Harahap di Batavia sejak tanggal 16 Agustus 1933 dipindahkan ke Bandoeng.⁷⁷ Nama *Sinar Pasoendan* kemudian digunakan lagi pada tahun 1919 oleh sekelompok orang sunda yang tergabung dalam Vergadering Pasoendan Semarang. Surat kabar ini mendukung partai Sarekat Islam (SI). Tuan B. Wiriadinata menjabat sebagai *directeur* dan *administrateur* mingguan yang diterbitkan *Pasoendan* Semarang ini.⁷⁸ Surat kabar berbahasa

⁷⁴ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (New York: Cornell University Press, 1995), hlm. 119.

⁷⁵ *De Preanger-bode*, 15-12-1911

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

⁷⁷ Akhir Matua Harahap, “Sejarah Bandung (44): Sinar Pasoendan (1933–1942) dan Parada Harahap; Surat Kabar Terbanyak di Bandung Era Kolonial,” dalam Poestaha Depok, dipublikasikan 12 April 2019, diakses 20 April 2026.

⁷⁸ Taufik Rahzen dan Muhidin M. Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: IBOEKOE, 2007), hlm. 155.

Sunda lainnya antara lain, *Tjahaja Pasoendan* (1912), *Papaes Nonoman* (1914), *Panoengtoen Kamadjoean* (1913), dan *Piwoelang Kagoeroean* (1913). Namun, di antara keempat media tersebut, *Papaes Nonoman* menunjukkan perhatian paling besar terhadap pengembangan bahasa Sunda. Hal ini dapat dipahami mengingat surat kabar tersebut merupakan organ penerbitan Paguyuban Pasundan, yang secara konsisten menempatkan pelestarian dan pengembangan bahasa serta kebudayaan Sunda sebagai salah satu agenda utamanya.⁷⁹ Semua artikel yang ditulis para penulis Sunda di surat kabar *Papaes Nonoman* banyak menggunakan istilah “*kemadjoean*”. Kemajuan oleh masyarakat Sunda biasanya diterjemahkan sebagai “sekolah” atau “buku-buku”. Kemajuan pada akhirnya dipahami sebagai bentuk kekaguman terhadap Belanda. Dengan kemajuan, Belanda/Eropa mengenalkan cara hidup yang benar-benar baru bagi masyarakat Sunda.⁸⁰

Tjahaja Pasoendan (1911-1919) merupakan surat kabar berbahasa Sunda pertama yang diproduksi oleh kalangan Bumiputera Sunda. Media ini berbentuk majalah dan terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam sebulan. Kehadiran *Tjahaja Pasoendan* tidak terlepas dari peran para pengurus dan aktivis Syarikat Islam yang berasal dari atau beraktivitas di wilayah Sunda. Meskipun menggunakan bahasa Sunda, isi *Tjahaja Pasoendan* relatif jarang menampilkan unsur-unsur etnis Sunda secara menonjol. Hal ini berkaitan dengan orientasi politik Syarikat Islam yang tidak berlandaskan pada identitas kesukuan, melainkan lebih menekankan pada ideologi dan solidaritas keislaman. Oleh karena itu, corak pemberitaan dan tulisan dalam *Tjahaja Pasoendan* lebih mencerminkan kepentingan dan gagasan Islam dibandingkan dengan penguatan identitas etnis Sunda.⁸¹

Pada bulan Desember 1922, surat kabar *Sipatahoenan* lahir melalui konferensi Paguyuban Sunda di Bandung. *Sipatahoenan* terbit setiap ahad dan Redaksinya dipegang oleh Soetisna Sendjaja (Soetsen) dan Bakrie Soeraatmadja di

⁷⁹ Soni Sadono, Brilindra Pandanwangi, dan Hening Laksani, “Pengajaran Bahasa Sunda Di Priangan Awal Abad Ke-20,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia* 6, no. 1 (Juni 2023): hlm. 16.

⁸⁰ Holy Rafika Dhona, “Wacana Kemadjoean Di Kelompok Etnis Sunda Awal Abad 20,” *INFORMASI* 45, no. 2 (2015): hlm. 180.

⁸¹ Holy Rafika Dhona, “Wilayah Sunda dalam Surat Kabar Sunda Era Kolonial,” *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2016): hlm. 4.

Tasikmalaya, dan Soeradiradja untuk wilayah Betawi. Dalam catatan sejarah Pagoejoeban Pasoendan, organisasi masyarakat Sunda ini tidak hanya memiliki surat kabar *Sipatahoenan*, tetapi juga pernah mengelola sejumlah media cetak lainnya. Beberapa di antaranya adalah *Papaes Nonoman* yang terbit pada periode 1914–1926, *Pasoendan* yang diterbitkan oleh Pagoejoeban Pasoendan cabang Bogor pada tahun 1915, *Sora Pasoendan* yang terbit pada tahun 1920, serta *Pasoendan* yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pada tahun 1930. Di antara berbagai media milik organisasi tersebut, *Sipatahoenan* merupakan surat kabar yang paling menonjol pengaruhnya. Surat kabar berbahasa Sunda ini secara konsisten mengusung semangat kebangsaan Indonesia. Penerbitannya diarahkan untuk membentuk kesadaran masyarakat penutur bahasa Sunda agar menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun menggunakan bahasa Sunda, *Sipatahoenan* tidak mengabaikan kepentingan nasional. Seperti halnya surat kabar berbahasa daerah lainnya yang termasuk dalam kategori pers *Vernacular*, *Sipatahoenan* kerap memuat pesan-pesan yang menegaskan cita-cita Indonesia merdeka.⁸²

Pada tahun 1923, terbit surat kabar *Soerapati* berbarengan dengan Kongres SI Merah dan PKI di Bandung dan Sukabumi pada tahun 1923. Surat kabar ini terbit pertama kali di Sukabumi dan menjadi surat kabar penyokong gerakan komunis. Surat kabar kiri ini dipimpin oleh seseorang yang bernama samaran “Si Oentoeng”. Dengan suara vokal yang banyak menyerang kebijakan pemerintah kolonial dan juga pemerintah Bumiputera, surat kabar yang terbit tengah bulanan dijual murah yaitu 75 sen per tiga bulan dibayar di muka dan harga eceran seharga 15 sen.⁸³ Di Garut, pada tahun 1931, terbit surat kabar *Sora Ra”jat Merdeka* berbahasa Sunda dengan Arudji Kartawinata sebagai pemimpin redaksi. Pada tahun yang sama di Sukabumi lahir surat kabar *Galih Pakoean*, objek penelitian ini. Surat kabar berbahasa sunda lainnya antara lain surat kabar penyokong SI lainnya adalah

⁸² Taufik Rahzen dan Muhidin M. Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007* (Jakarta: IBOEKOE, 2007), hlm. 226.

⁸³ Dharyanto Tito Wardani, “Peranan Surat Kabar Soerapati Dalam Perlawanan Intelektual Pribumi Di Jawa Barat Tahun 1923-1925,” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (Maret 2016): hlm. 5.

Simpaj (1916), terbit dua kali seminggu dengan menggunakan bahasa Sunda dan *Sora Merdeka* (1920) mingguan yang juga berbahasa Sunda. Pers lain yang non-partisan dengan menggunakan bahasa Sunda antara lain *Padjadjaran* (1918-1923) yang terbit mingguan, *Siliwangi* (1921-1922) terbit mingguan, *Panggeuing* (1929) terbit bulanan dan *Tirtajasa* (1929-1934) terbit harian.⁸⁴

⁸⁴ Herlina, Nina. 2003. *Sejarah Tatar Sunda Jilid 1*. Bandung: Satya Historika. Hlm. 118